

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-
MAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Elina Putri Ramadhani

NPM : 1621020054

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-
MAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Elina Putri Ramadhani

NPM : 1621020054

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II: Drs. Susiadi AS,M.Sos.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020M**

ABSTRAK

Kepala Negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitive tanpa ikatan. Berhubungan dengan tema pembahasan sekarang ini sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syari'at dan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia : pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini, *Pertama*, Bagaimana Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi?, *Kedua*, Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh serta memperluas wawasan dalam ilmu kepemimpinan, tentang syarat pengangkatan kepala negara serta proses-proses pengangkatan kepala negara, untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah dan Imam Al-Mawardi

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitik.

Jadi kesimpulannya adalah dari banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan Al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya, ia mengemukakan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah dia memang tidak menemukan satu sistem yang baku mengenai pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah pada masa empat Khulafaur Rasyidin tidak juga di temukan petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara mereka semua mengakhiri tugasnya karena wafat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

Nama : Elina Putri Ramadhani

NPM : 1621020054

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi
Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

Drs. Susiadi AS, M.Sos. I

NIP. 195808171993031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si

NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”. Disusun oleh Elina Putri Ramadhani NPM.1621020054, Program studi Siyasah Syar’iyyah. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Rabu, 02 September 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag
Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H
Penguji Utama : Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag
Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Penguji Pendamping II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.,

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H
NPM.198210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan kepada Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.s. An-Nisa 59)”

PERSEMBAHAN

Dengan keridhoan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bpk. Eli Suhaeli dan Ibu Endang Widarsih yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi serta menjadi Madrasah utama sejak saya masih dalam kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini
2. Kepada Kakak ku Septian Pratama Putra yang telah mendoakan juga memberi pengarahan serta dorongan dan semangat demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elina Putri Ramadhani lahir di Teluk Betung kecamatan Kupang Teba, Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 1998. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Septian Pratama Putra.

Lahir dari pasangan suami isteri ayahanda Eli Suhaeli dan Ibunda Endang Widarsih, Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) dan selesai pada tahun 2003, SD Negeri 1 Sukabumi Indah selesai pada tahun 2004, SMP Negeri 24 Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, SMA Perintis 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang di ridhoi oleh ALLAH SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada program Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menganturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Frenki M.Si., Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Hervin Yoky Pradikta, M.H.I., Sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Dr. H. Khairuddin, M.H Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
9. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Bapak dan Ibu staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. Teman-temanku mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 khususnya Siyasah Kelas A: Desti, Ellemia, Hendy, Hapi, Ragil, Yurnedi,

Rizal, Rasyid, Marendy, Risky, Wahyu Islamy, Naufal, Uspan, Ican dkk.

13. Sahabat-sahabatku Alifah, Afifah, Yolanda, Indah, Tiara, Ulfa, Yuke dan Sindy yang selalu menyemangati ku.

14. Sahabat – sahabat KKN ku kelompok 151 Desa Sinar Mulyo : Indri, Lupi, Nai, Rizqina, Tomi,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 2 Juli 2020
Penulis

Elina Putri Ramadhani
NPM. 1621020054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	6
H. Metode Penelitian	6
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah	10
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	14
B. Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah.....	20
C. Kajian Terdahulu	34

BAB III PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

A. Biografi Al-Mawardi.....	36
B. Karya-Karya Al-Mawardi	41
C. Situasi Politik Pada Masa Al-Mawardi	43
D. Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi.....	45
E. Pembebasan Imam dari Jabatannya.....	61
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Al-Mawardi.....	62
G. Tugas-Tugas Seorang Kepala Negara	65

BAB IV ANALISA

A. Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi	68
B. Pemikiran Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA**. Ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk memahami keadaan yang sebenarnya.¹
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Pemikiran adalah suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.³
4. Imam Al-Mawardi adalah seorang pemikir islam terkenal, ahli fiqh terkemuka dari ahli mazhab Syafi'I, dan tokoh politik yang cukup berpengaruh pada masa daulah Abbasiyah.⁴
5. Proses adalah runtutan perubahan/ rangkaian tindakan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. ⁵

¹ Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) h. 20

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 3

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,2011), h. 725

⁴ Dr. Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), h. 365

6. Kepala Negara adalah lambang kesatuan rakyat dan pemegang kekuasaan paling tinggi dalam pemerintahannya⁶

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Secara Objektif

Proses pengangkatan kepala negara sangat menarik untuk di kaji agar kita mengetahui bagaimana proses sebuah pengangkatan seorang kepala negara untuk menjadi seorang pemimpin disuatu negara. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui pemikirannya tentang proses pengangkatan Kepala negara.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi penulis pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dikaji dan diteliti karena banyak literatur yang sangat berkaitan dengan skripsi ini, sehingga pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

⁵*Ibid*, h.1106

⁶ Dalil Mutiara, *Ilmu Tata Negara*, (Pustaka Islam, Jakarta), hlm. 24

C. Latar Belakang Masalah

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.⁷

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia merenungkan semua itu dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain, namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpin dan pemerintahannya.

⁷Imam al- mawardi, *Hukum Tata Negara dalam Takaran islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.) h. 15

Allah SWT berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah Al-Khulafa Al-Rasyidun dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umaiyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik islam ketika itu.⁸ Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Namun

⁸Al-Ghazali, *al-Tibr al- Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, terjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Mizan,1994), h. 136

demikian, lanjut imam Al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan di atas Al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan rasio melainkan berdasarkan kewajiban agama (syari'i).⁹

Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Bahkan ia menolak keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqd* ini. Menurutnya, dalam praktiknya pada pasca *al-Khulafa al-Rasyidun*, *ahl al-hall wa al-'aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka di angkat oleh khalifah.

Berangkat dari praktik yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin pada masa pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintah model khilafah dalam sejarah Islam. Sepanjang masa pemerintahan Khuafaur Rasyidin. Para pakar politik Islam menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis meskipun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini memiliki cara yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena dalam proses penyelenggaraannya

⁹ Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-jund, 1972), h .162

dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, persamaan dan prinsip-prinsip lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.¹⁰

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Imam Al-Mawardi dalam Proses pengangkatan Kepala Negara dalam pandangan Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengangkatan Kepala Negara menurut pandangan Al-Mawardi ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang proses pengangkatan Kepala Negara ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pengangkatan Kepala Negara menurut Imam Al-Mawardi .
- b. Untuk mengetahui proses pengangkatan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dalam memahami bagaimana suatu proses pengangkatan Kepala Negara.

¹⁰ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2018). h. 265

- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalani proses pengangkatan Kepala Negara.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian,¹¹ hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan¹². Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca dan memahami bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu

¹¹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 26

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm. 127.

fenomena. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi mengenai Proses pengangkatan Kepala Negara yang kemudian akan dikaitkan dengan Fiqh Siyasah.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu *Library Research* maka data yang dipergunakan yaitu:

a. Data Primer

Adalah data- data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersebut adalah buku Al-Ahkam al- Sulthaniyyah, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Adalah sumber pendukung dari primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku dan teori-teori Fiqh Siyasah

c. Data Tersier

Adalah data yang mendukung data sekunder yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni antara lain Internet, Jurnal, Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang

memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada dipustaka baik berupa, dokumen, majalah, maupun lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dan membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas tidak berlebihan dan tanpa masalah.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi yang bersifat tertulis atau tercetak dalam media massa. Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir Induktif yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum yang di dapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.¹⁴ Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai pendapat tentang pandangan Al-Mawardi mengenai Proses Pengangkatan Kepala Negara lalu di kaitkan dengan Fiqh Siyasah, kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹³ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.37

¹⁴ Khomarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesi*, (Bandung: Angkasa 1982), h.150

BAB II KAJIAN TEORI PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹⁵ Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura’at* (hukum acara), *siyasah*

¹⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “*Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.2

(politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci.

Berdasarkan gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu di teliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁶ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "penganturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."¹⁷ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah" mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."

¹⁶ *Ibid*, h. 3

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.4-5.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.¹⁸ Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah "pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat tarik benang merah bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.¹⁹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

¹⁸ *Ibid*, h. 4

¹⁹ *Ibid*.

kekukasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekukasaannya.²⁰

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus. Dengan demikian, ilmu fiqh siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.²¹ Kewajiban ini di perintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59)

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

²¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 10-12.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Thamiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasri'iiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah* (Politik peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iiyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iiyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan).²²

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*).²³

Salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah *siyasah dusturiyyah*. *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam”* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), h. 15

²³ *Ibid.*

anggota kependetaan (pemuka agama) dan Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.²⁴

Permasalah di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan–kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi

²⁴ Ibid, *Muhammad Iqbal*, h. 178

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua pokok : pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup beberapa ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
7. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya²⁶

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada :

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang

²⁵ A. Dzajuli, Fiqh Siyasah “ *Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2004) h. 47

²⁶ Ibid, h. 48

Dasar, Undang-Undang peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *siyasah tanfizdiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sumber *fiqh siyasah dusturiyyah* tentu pertama-tama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua, hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.²⁷

Sumber ke empat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam

²⁷ *Ibid*, h. 53

mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihatra keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkat menjadi satu kesatuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan, karena kaidah : *al-adah al-mahmakah* bukan tanpa syarat, tapi *al- 'adah al-shahihah*.²⁸

3. Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah

a. Mekanisme Pengangkatan *Khaulafa Ar-Rasyidun*

Abu Bakar Siddiq merupakan kepala negara (al-Rasis) kedua di Madinah pasca kepemimpinan Muhammad Ibn'Abdullah. Fakta historis menunjukkan bahwa beliau dipilih berdasarkan *ijm' al-umma* (kesepakatan umat). Para tokoh yang hadir pada saat itu merupakan tokoh ktermuka yang secara sosiologi mempersentasikan kelompok sosialnya masing-masing. Putusan yang di tetapkan dalam musyawarah tersebut adalah mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara pengganti

²⁸ *Ibid*, h. 54

Muhammad bin' Abdullah. Dasar pemikiran yang di jadikan alasan peserta musyawarah adalah *qiyas*. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar secara individu selalu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan posisi beliau dalam hal apapun termasuk menggantikan menjadi imam shalat.

Berdasarkan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan politik yuridis bagi pengangkatan Abu Bakar sebagai kepala negara, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut identik dengan teori demokrasi *representative* (perwakilan) yang disebut Al-Mawardi dengan istilah *Ahl al-wa al-'Aqd*.

Umar Ibn Khatab ditetapkan menjadi khalifah kedua pasca Abu Bakar melalui wasiat yang di sampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini para sahabat senantiasa menyetujuinya. Pasca persetujuan dari sahabatnya, 'Umar Ibn Khatab lalu diba'it oleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengan demikian, maka secara teori politik, baik dalam perspektif politik Islam atau teori politik umum, mekanisme tersebut secara yuridis dapat dibenarkan. Secara yuridis, didasarkan pada alasan bahwa setiap kepala negara mempunyai hak prerogatif.

Usman Ibn 'Affan, khalifah ketika dipilih sebagai tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat seni yang dianggap mempersentasikan (mewakili) umat Islam ada waktu itu. Tim formatur itu ditunjuk oleh Umar bin Khatab menjelang wafat. Sebagaiman dalam tradisi politik Islam, untuk mendapatkan legitimasi yang sah secara politis, Usman pun di baiat

oleh para sahabatnya sebab hal tersebut merupakan persyaratan bagi keabsahan seorang kepala negara yang akan menjadi pemimpin umat atau warga negara yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Ali Ibn Abi Thalib selaku pengganti Usman Ibn 'Affan pasca terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian umat yang tidak puas atas kepemimpinan Usman Ibn 'Affan menjadi khalifah keempat. Mekanisme pengangkatan Ali bin Abi Thalib sama dengan yang lainnya yakni melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan baiat oleh warga negara Madinah.

Berdasarkan atas dasar prinsip persamaan hak seluruh warga negara maka :

- 1) Khalifah Abu Bakar di pilih dan di angkat atas dasar musyawarah pemuka-pemuka muslimin yang kemudian disetujui oleh jamaah muslimin tanpa ada peninggalan "calon" dari Rasul.
- 2) Khalifah Umar di pilih dan di angkat oleh para pemuka muslim dan di setujui oleh jamaah muslimin. Umar ditunjuk sebagai pengganti khalifah Abu Bakar yang pada saat itu sedang sakit dan akan wafat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat pilihan.
- 3) Khalifah Utsman dipilih dan di angkat oleh enam orang calon yang terdiri dari (Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqash, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah) yang ditunjuk oleh Khalifah Umar

sebagai pengganti waktu beliau wafat disebabkan karena suatu pembunuhan.

- 4) Khalifah Ali dipilih dan di angkat oleh jemaah kaum muslimin di Madinah setelah khalifah Utsman di bunuh dengan kejam oleh seorang pemberontak. Pemilihan dan pengangkatan khalifah Ali adalah dalam suasana yang sangat keras dengan pertimbangan kalau khalifah tidak dipilih dan di angkat maka keadaan akan menjadi kacau.

Berdasarkan pemilihan dan pengangkatan para *Khulafaur Rasyidin* seperti yang sudah di jelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- 1) Seorang khalifah dapat dipilih dan di angkat oleh jemaah kaum muslimin dengan musyawarah.
- 2) Pemilihan ada dari calon (calon-calon) yang di tinggalkan oleh khalifah terdahulu atau dari calon-calon yang di kemukakan oleh jemaah muslimin sendiri.
- 3) Para khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya sendiri.
- 4) Pada masa pemulaan Islam telah terlaksana pemilihan khalifah.²⁹

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjuk atau memberikan mandate untuk menggantikan posisi beliau sebagai seorang kepala negara di Madinah sehingga mekanisme kepala negara setelah beliau wafat

²⁹ Sutisna, "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam". *Jurnal Sosial Humaniora* ISSN 2087-4928, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2014), h. 43-49

dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. Pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Tsafiqah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW di Saidah. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat keras dan melalui perdebatan yang sengit antara golongan Anshor dengan golongan Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab. Holongan muhajirin hanya diwakili oleh kedua tokoh tersebut sebab yang melakukan prakarsa untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah kaum Anshor, sedangkan kaum muhajirin termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib (dari barisan keluarga Nabi) sedang sibuk mengurus jenazah Nabi. Akibatnya, golongan Muhajirin hanya diwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab. Musyawarah ini menghasilkan terpilihnya Abu Bakar Shiddiq sebagai Khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW.

Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua adalah melalui penunjukkan dari Khalifah pertama dalam hal ini penunjukkan dari Abu Bakar Shiddiq. Penunjukkan dari Khalifah pertama ini disambut baik oleh semua kaum muslimin karena memang khalifah pertama menunjuk penggantinya bukan hanya sekedar menunjuk atas dasar *like and dislike*, tetapi beliau menunjuk orang yang tepat. Selain itu, penunjukkan ini

dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi dari para pembesar sahabat, sehingga surat penunjukkan dari Abu Bakar Shiddiq itu tidak mendapat proses sedikitpun dari para sahabat dan Umar diterima menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar Shiddiq.

Pada saat pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dilakukan dengan cara kesepakatan beberapa sahabat Nabi yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Mereka bermusyawarah untuk memilih dari salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah. Pengangkatan Utsman Bin Affan sebagai khalifah ketiga berbeda dengan dua pendahulunya. Kalau yang pertama dengan pemilihan secara musyawarah yang kedua dengan penunjukkan dari Khalifah sebelumnya, maka pengangkatan Utsman Bin affan sebagai khalifah ketiga adalah melalui satu tim yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang beranggotakan enam orang ditambah satu orang (yang ketujuh) anaknya Abdullah bin Umar dengan catatan anaknya tidak berhak untuk dipilih. Oleh tim ini maka dipilihlah Utsman Bin Affan sebagai khalifah ketiga.

Pemilihan Ali bin Abi Thalib dipilih dalam suasana umat Islam sedang dalam kekacauan dan penuh fitnah sebagai akibat dari terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan. Pemilihannya dilakukan oleh umat Islam Madinah, namun mendapat protes dari Gubernur Damaskus yaitu Muawiyah bin abi Sufyan yang kelak mendirikan Khalifah Bani umayyah. Protes muawiyah tersebut bukan karena tidak setuju dengan diri pribadi Ali bin Abi thalib sebagai khalifah. Akan tetapi, Muawiyah meminta

diusut terlebih dahulu siapa pembunuh Khalifah Usman bin Affan, barulah kemudian dipilih dan diangkat Khalifah. Hal ini menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan.

Berdasarkan fakta tersebut maka mekanisme pemilihan para *khalifah* (kepala negara) yang dilaksanakan oleh umat Islam berbeda-beda. Apabila diringkaskan maka ada empat cara yaitu : *Pertama*, kesepakatan umat dengan isyarat Rasulullah SAW, *Kedua*, penunjukkan oleh khalifah sebelumnya, *Ketiga*, penunjukkan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah, *Keempat*, kesepakatan umat Islam.

Setelah masa *Khulafaur Ar-Rasyidin*, selanjutnya kepala negara dilakukan dengan meniru tradisi di Persia yaitu didasarkan keturunan sehingga para penguasa setelahnya adalah keturunan atau keturunan dekat dari penguasa sebelumnya. Sistem kerajaan ini terus berlanjut pada kekuasaan-kekuasaan berikutnya yaitu Bani Umayyah dan hingga masa Daulah Turki Usmani.³⁰

b. Pengangkatan Kepala Negara

Pengangkatan kepala negara berdasarkan pemilihan merupakan materi bahasan para junis sunni. Al-Baqillani menolak doktrin Syi'ah tentang penunjukan imam berdasarkan *nash* (bukti tekstual). Karena ia menganggap keyakinan ini didasarkan atas *khobar ahad*, tidak atas *khobar*

³⁰ *Ibid.*

mutawatir. Artinya tak ada orang yang mengetahui tentang penunjukkan Ali oleh Nabi untuk memangku jabatan imam. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam pertemuan Tsafiqah Bani Sa'idah, menurut pendapatnya, adalah konsesus umat Islam sekaligus menolak kepercayaan Syi'ah sebagai suatu yang palsu sejak awal. Jika cara penetapan tersebut tidak sah, kata Al-Baqillani maka sistem pengangkatan imam harus dengan jalan pemilihan (*al-ikhtiyar*) oleh *ahl al-halli wa al-aqd*.³¹

Menurutnya, pemilihan sah walaupun dilakukan oleh seorang dari *ahl al-halli wa al-aqd*. Ia menetapkan seseorang yang pantas untuk memangku jabatan imam. Setelah kepala negara terpilih, kaum muslimin harus hadir memberikan baiat kepadanya dan memberitahu kepada rakyat banyak.

Berdasarkan konsepsi Islam kepala negara dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*), kecakapan atau mempunyai otoritas dalam mengelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*) dan keadilan (*'adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.³²

Dalam memilih seorang kepala negara, rakyat harus mencari orang yang "paling utama" (*al-afdhal*). Tapi jika tidak ada kesepakatan siapa

³¹ *Ibid*

³² Afridawati "Konsep Islam Tentang Negara". *Jurnal Islamika*, Vol 14 No. 1 (2014), h.61

yang “ paling utama”, maka menurutnya hukum sah mengangkat seorang yang kurang utama. Hal ini untuk mencegah tidak terjadi kekacauan di kalangan rakyat Doktrin ini penting bagi sunni, terutama doktrin Asy’ari.

Masih berkaitan dengan masalah pengangkatan kepala negara, Al-Baillani tidak bisa membenarkan “legalitas adanya dua orang atau lebih kepala negara atau imam pada satu waktu yang bersamaan.” Pendapatnya ini, secara implisit untuk menolak keabsahan klaim Fathimiyah yang Syi’ah dan daulah Umayyah, rival Abbasiyah, di Spanyol. Menurutnya, sekalipun umat Islam telah terpecah ke dalam berbagai aliran dan masing-masing mengklaim berhak punya pemerintahan sendiri, tetap tidak bisa dibenarkan. Sedangkan kepala negara yang sah adalah yang terdahulu diangkat, bila ada yang menentangnya maka ia harus di perangi.

Al-Baghdadi mensinyalir bahwa tidak ada kesepakatan pendapat tentang tata cara pengangkatan kepala negara, apakah berdasarkan cara penunjukkan atau pemilihan. Pada umumnya kelompok sunni, termasuk Mu’tazilah dan Khawarij, menetapkan dengan cara pemilihan. Ini dilakukan dengan cara ijtihad yang bertanggung jawab oleh mereka yang memenuhi syarat melakukannya untuk memilih seorang yang pantas untuk memenuhi jabatan itu. Akan tetapi, menurutnya boleh juga dengan cara penunjukkan. Perbedaan pendapat terjadi juga di antara partisan mengenai jumlah pemilih yang sebenarnya.

Menurut Al-Asy’ari pemilihan yang dilakukan oleh seorang yang punya kualifikasi dalam berijtihad adalah sah. Sedangkan Mu’tazilah

paling tidak dua orang saleh dan berkemampuan dalam berijtihad. Seorang khalifah yang terpilih menurut Al-Baghdadi harus di baiat oleh para pemilih sebagai bukti terjadinya kontrak di antara dua pihak. Akan tetapi ia tidak menjelaskan apakah baiat para pemilih itu secara perwakilan dan apakah perlu baiat umum, ia juga berpendapat bahwa pengangkatan imam secara wasiat, menurutnya, adalah sah. Tetapi hukumnya tidak wajib. Pendapat ini ia dasarkan pada penunjukan Umar oleh Abu Bakar untuk menjadi penggantinya.

Adapun Ibn Abi Rabi' tidak berbicara tentang sistem pengangkatan kepala negara, diamnya itu bisa diartikan sebagai penerimaan terhadap sistem yang berlaku pada masanya. Suksesi kepemimpinan dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasiyah berlangsung secara turun temurun.

Sedangkan Al-Mawardi hanya mengemukakan pendapat-pendapat yang ada. Menurutnya pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok umat : pertama, ahl al-ikhtiyar yaitu mereka yang berhak memilih; kedua, ahl-imamat yaitu orang-orang yang berhak memangku jabatan kepala negara. ahl al-ikhtiyar atau para pemilih adalah mereka yang memenuhi kualifikasi, yaitu : a) berlaku secara adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku; 2) berilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan; 3) memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualitas seperti itu mereka dapat menentukan pilihan kepada

seseorang yang lebih pantas diangkat jadi kepala negara dan mampu mengelola urusan negara dan rakyat.

Dalam pengangkatan seorang kepala negara, Al-Mawardi berkata terdapat dua cara. Yaitu cara pertama adalah pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqd* (mereka yang memiliki wewenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *ahl al-ikhtiyar*, kemudian cara yang kedua yaitu penunjukkan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa. Apabila pengangkatan ini dilakukan dengan cara pemilihan, menurutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, sekelompok ulama berpendapat pemilihan hanya sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *ahl al-'aqd* dari seluruh negeri atas persetujuan yang bulat (ijmak). Pendapat golongan ini didasarkan pada pemilihan dan baiat Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah secara ijmak oleh umat Islam yang hadir ketika itu. *Kedua*, golongan ulama fikih dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah jika dilakukan paling sedikit oleh lima orang dari *ahl al-halli wa al-aqd*. Golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar. Menurut mereka, pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Mereka yang membaiat adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hadhira, Basyr bin Saad dan Salim.

Berdasarkan pada kebijaksanaan Umar dalam membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang yang bertugas memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah dengan persetujuan lima

orang. *Ketiga*, kelompok ulama kuffah berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang. Lalu yang *keempat*, kelompok ulama lain berpendapat bahwa pemilihan sah dilakukan oleh seorang saja.

Menurut pendapat Al-Mawardi, salah seorang tugas terpenting dari anggota lembaga pemilih (*ahl al-halli wa al-aqd atau al-ikhtiyar*) yaitu mengadakan penelitian terlebih dulu terhadap kandidat kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan atau tidak, jika telah memenuhi persyaratan kandidat tersebut diminta kesediannya lalu ditetapkan sebagai kepala negara dengan ijtihad atas dasar pemilihan yang diikuti dengan pembaiatan. Dalam pembaiatan ini tidak ada paksaan, rakyat yang telah membaiai harus mentaatinya. Tetapi jika ada di antara pemilih yang tidak setuju dengan kepala negara yang terpilih, karena pengangkatannya harus atas dasar *persetujuan dan pemilihan*, maka jabatan kepala negara tersebut harus diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan terhormat itu. Atas dasar tersebut para ulama fikih sepakat bahwa imamah dibentuk atas dasar persetujuan dan pemilihan oleh *ahl al-ikhtiyar*.³³

Mengenai mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ada beberapa pendapat, Taqiyuddin An-Nahbani, menjelaskan ada lima cara pemilihan khalifah atau kepala negara, yaitu :

³³ J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah “*Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019) h. 256-262

- a. Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota atau ahlul halli wal aqdi yang ada di sana atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpandang atau yang pantas untuk mengurus khilafah, maka setelah atau sebelum meninggalnya khalifah sebelum di berhentikan atau pengunduran dirinya, hendaknya perlu berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan kekhalifahan. Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah satu di antara mereka yang di anggap kompeten.
- b. Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan lembaga Ahlul halii wal Aqdi atau tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya, baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah di lakukan oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan Abu bakar karena trauma atas peristiwa di Safiqah Bani Sa'adah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian mereka mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah Abu Bakar meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Setelah itu barulah Umar di baiat setelah wafatnya Abu Bakar.

- c. Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya sendiri atau karena permintaan orang-orang/ rakyat atau pihak lain. Seperti yang terjadi pada khalifah Umar yang sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat. Beberapa orang yang telah ditunjuk tersebut segera melakukan musyawarah dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang kandidat yang sama-sama mendapatkan dukungan kuat yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
- d. Setelah meninggalnya seorang khalifah, sekelompok kaum muslimin atau Ahlul halli wal aqdi, atau kelompok yang mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya memegang jabatan tersebut, maka barulah dapat diambil suatu baiat secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat untuk membi'at ali sebagai pengganti Utsman bin Affan, maka dengan demikian sahlah pembaiatan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib.
- e. Setelah negara berdiri dan di sana telah terdapat majelis umat yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara serta mengoreksi penguasa, dimana para anggota dari kalangan muslim yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan terhadap jumlah kandidat.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, mekanisme pengangkatan kepala negara yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan mekanisme para Khulafaur Rasyidun, dapat di tempuh melalui beberapa cara;

- a. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur ahlul halli wal aqdi atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah, yang dibentuk dengan dua cara, *Pertama*, oleh umat Islam melalui kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. *Kedua*, ahlul halli wal aqdi yang dibentuk halifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
- b. Pemilihan atau pengangkatan yang di lakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah sebelumnya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja bahwa cara yang kedua ini calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat dan rakyat.³⁴

c. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan

³⁴ Agustina Nurhayati "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam", Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden intan Lampung (di akses pada tanggal 07 maret 2020).

penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga perlu memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan hasil dari penelitian terdahulu dari beberapa jurnal/skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti penelitian Muhammad Nasir yang berjudul “ Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Thaimiyah (Kajian dalam sistem pemilihan Presiden Republik Indonesia)” yang dibuat pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara Pengangkatan Kepala Negara namun yang membedakan dalam penelitian Muhammad Nasir menggunakan studi pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Thaimiyah dan kajian nya dalam sistem pemilihan Presiden Republik Indonesia, sedangkan penulis menggunakan studi pemikiran Al-Mawardi dan di analisis dari Fiqh Siyasah.³⁵

Selanjutnya skripsi karya Wahyudi Sahri yang berjudul “ Pemimpin Non Muslim Dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah)” yang dibuat pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Dalam penelitian tersebut

³⁵ Muhammad Nasir “ *Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al – Mawardi dan Ibn Thaimiyah (Kajian dalam sistem pemilihan Presiden Republik Indonesia)* “ Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.

peneliti sama-sama mengkaji tentang pengangkatan seorang pemimpin namun yang membedakan dalam penelitian Wahyudi Sahri adalah peneliti lebih mengkaji tentang Pemimpin Non Muslim Dalam Perspektif Ormas Islam dan studi nya pada Nahslatul Ulama', Muhamadiyah, dan Wahdah Islamiyah, sedangkan penulis menggunakan studi pemikiran Al-Mawardi lalu dan di analisis dari fiqh siyasah.³⁶

³⁶ Wahyudi Sahri “ *Pemimpin Non Muslim Dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah)* “ Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Alaudin Makassar 2017.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004)
- Abdul Wahhab Kallaf, *Al-Siyasah al-Syari'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997)
- Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqratiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980)
- A Dzajuli, Fiqh Siyasah “*Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*” (Jakarta: Kencana, 2004)
- Al-Ghazali, *al-Tibr al- Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, terjemah Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Mizan, 1994)
- Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-jund, 1972)
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993),
- Dalil Mutiara, *Ilmu Tata Negara*, (Pustaka Islam, Jakarta)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah al-qur'an, 1971)
- Dr. Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Imam Al- Mawardi, *Hukum Tata Negara dalam Takaran islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shultaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2017)
- J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah “ Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran”* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019)

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011)

Khomarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung: Angkasa1982)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,(Jakarta : Pustaka Firdaus,1999)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008).

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah “ Dokterin dan Pemikiran Politik Islam “*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2008).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran SEjarah dan Pemikiran*,(Jakarta: UI Press,1991).

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015).

II. Jurnal

Afridawati “*Konsep Islam Tentang Negara*”. Jurnal Islamika, Vol 14 No.1

Agustina Nurhayati “*Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam “* Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (di akses pada tanggal 07 maret 2020)

Ahmad Thamys, “*Konsep Pemimpin Dalam Islam*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018)

Muhammad Amin, “*Pemikiran Politik Al-Mawardi*”. Jurnal Politik Profetik, Vol.4 No.2

Muhammad Nasir “*Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Thaimiyah (Kajian dalam sistem pemilihan Presiden Republik Indonesia)*” (Aceh, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016).

Wahyudi Sahri “ *Pemimpin Non Muslim Dalam Persepektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah)*” (Makassar, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Alaudin Makassar 2017).

Rahmawati, “*Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*”. Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum, Vol. 6, No.2.

Rashda Diana, “*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam* “. Jurnal Universitas Darussalam Gontor, Vol.13 No.1

Sutisna, “*Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam*” Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928, Vol. 5 No. 2.

Wahyudi Sahri “ *Pemimpin Non Muslim Dalam Persepektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah)*” (Makassar, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Alaudin Makassar 2017).